



## Memecah Siklus Kematian Keluarga : Analisis Kebijakan Kriminal Jepang terhadap *Familicide* di Masyarakat Urban

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Urip Sumoharjo KM.05, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan

Korespondensi Penulis: [zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)\*

**Abstract.** *Familicide or murder of a nuclear family member. Urbanization in Japan has exacerbated the risk of familicide by changing patterns of social interaction and increasing life stress. Unfortunately, Japan's criminal policy still has weaknesses in detecting and preventing familicide. This study aims to explore the phenomenon of familicide in urban Japanese society through a critical analysis of existing criminal policies. This study uses a qualitative research method with a conceptual approach. The data collection method was collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study show that although the crime rate in Japan is relatively low, familicide remains a crucial issue that reveals fundamental weaknesses in the country's criminal policy. The legal approach that emphasizes post-incident responses, without being supported by adequate early prevention mechanisms, indicates an urgent need to reform the policy. Reforms must include proactive efforts to detect potential risks and implement coordinated interventions to prevent violence.*

**Keywords:** *Criminal Policy, Familicide, Urban.*

**Abstrak.** *Familicide* atau pembunuhan terhadap anggota keluarga inti. Urbanisasi di Jepang telah memperburuk risiko terjadinya *familicide* dengan mengubah pola interaksi sosial dan menambah tekanan hidup. Sayangnya, kebijakan kriminal Jepang masih memiliki kelemahan dalam mendeteksi dan mencegah *familicide*. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena *familicide* di masyarakat urban Jepang melalui analisis kritis terhadap kebijakan kriminal yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tingkat kejahatan di Jepang tergolong rendah, *familicide* tetap menjadi isu krusial yang mengungkapkan kelemahan mendasar dalam kebijakan kriminal negara tersebut. Pendekatan hukum yang lebih menekankan pada respons pasca-kejadian, tanpa didukung mekanisme pencegahan dini yang memadai, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi kebijakan. Reformasi harus mencakup upaya proaktif dalam mendeteksi potensi risiko dan menerapkan intervensi terkoordinasi untuk mencegah terjadinya kekerasan.

**Kata kunci:** *Familicide, Kebijakan Kriminal, Urban.*

### 1. LATAR BELAKANG

*Familicide* atau tindakan pembunuhan terhadap anggota keluarga inti, telah menjadi fenomena yang memprihatinkan di berbagai belahan dunia, termasuk Jepang (Andreas & Andrea Ilic, 2020). Fenomena ini menyoroti sisi kelam dari struktur sosial dan dinamika keluarga di masyarakat modern, khususnya di negara dengan tekanan budaya dan ekonomi yang intens. Di Jepang, kasus *familicide* sering kali mencerminkan interaksi yang kompleks antara faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum yang saling memengaruhi. *Familicide* tidak sekadar tindakan kriminal biasa; ia adalah puncak dari akumulasi tekanan yang melibatkan rasa putus asa, kehancuran hubungan emosional, dan

kegagalan sistemik dalam mendeteksi atau merespons konflik domestik. Fenomena ini menjadi lebih mencolok di masyarakat urban Jepang, di mana isolasi sosial, tekanan ekonomi, dan tuntutan untuk mempertahankan citra keluarga ideal menciptakan lingkungan yang rentan terhadap tragedi.

Di Jepang, konsep keluarga sering dianggap sebagai pilar utama masyarakat (Julian Brook Ruszel, 2019). Filosofi ini berakar dari nilai-nilai tradisional Konfusianisme yang menekankan hierarki, harmoni, dan tanggung jawab kolektif. Namun, dalam praktiknya, struktur keluarga di Jepang telah mengalami transformasi besar seiring dengan modernisasi dan urbanisasi yang pesat. Kehidupan perkotaan yang kompetitif dan individualistik menciptakan jarak emosional antara anggota keluarga, sekaligus menekan mereka untuk tetap memenuhi ekspektasi sosial. Dalam situasi seperti ini, konflik domestik sering kali tidak terungkap hingga mencapai titik kritis. Banyak pelaku *familicide* merasa tidak memiliki jalan keluar lain selain melakukan tindakan ekstrem sebagai respons terhadap tekanan yang mereka alami, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, pelaku adalah kepala keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi berat, konflik hubungan, atau gangguan mental yang tidak terdiagnosis.

Statistik mengenai *familicide* di Jepang menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Laporan dari Badan Kepolisian Nasional Jepang mencatat bahwa sebagian besar pelaku *familicide* adalah laki-laki berusia paruh baya, sementara korban sering kali meliputi istri, anak-anak, dan orang tua pelaku. Karakteristik ini menunjukkan bahwa *familicide* di Jepang kerap berkaitan dengan dinamika kekuasaan dalam keluarga, di mana pelaku merasa memiliki otoritas mutlak atas kehidupan keluarganya. Faktor ekonomi juga sering menjadi pemicu utama, terutama dalam kasus di mana pelaku menghadapi kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, atau tekanan finansial yang berat. Dalam beberapa kasus lainnya, rasa malu atau kehilangan kehormatan sosial memicu pelaku untuk melakukan tindakan ekstrem ini sebagai cara untuk "menyelamatkan" keluarga dari apa yang mereka anggap sebagai aib.

Urbanisasi di Jepang telah memperburuk risiko terjadinya *familicide* dengan mengubah pola interaksi sosial dan menambah tekanan hidup. Kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya menawarkan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga menuntut harga yang mahal berupa isolasi sosial dan fragmentasi hubungan komunitas. Kehidupan yang cepat dan kompetitif di lingkungan urban sering kali meninggalkan individu tanpa dukungan emosional yang memadai, bahkan dalam lingkup keluarga. Ketidakhadiran jaringan sosial yang kuat membuat individu yang mengalami tekanan

cenderung memendam masalah mereka hingga mencapai titik di mana konflik berubah menjadi kekerasan. Dalam situasi ini, kebijakan publik Jepang gagal memberikan mekanisme dukungan yang memadai untuk mencegah tragedi seperti *familicide*, baik melalui sistem hukum maupun program sosial.

Analisis terhadap kebijakan kriminal Jepang menunjukkan bahwa negara masih memiliki kelemahan dalam mendeteksi dan mencegah *familicide*. Sistem hukum Jepang cenderung berfokus pada respons pasca-kejadian, dengan penekanan pada penyelidikan dan hukuman terhadap pelaku, tetapi kurang memberikan perhatian pada pencegahan melalui identifikasi dini konflik keluarga atau gangguan mental. Selain itu, budaya Jepang yang menghargai privasi keluarga menjadi penghalang bagi intervensi pihak luar, termasuk penegak hukum dan pekerja sosial (Helaine Selin, 2021). Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara sistem kesehatan mental, layanan sosial, dan aparat penegak hukum, yang seharusnya berperan penting dalam menangani dinamika kekerasan domestik. Akibatnya, banyak kasus *familicide* yang sebenarnya dapat dicegah jika terdapat sistem yang mampu mengenali tanda-tanda peringatan lebih awal.

Meskipun *familicide* telah menjadi perhatian global, fenomena ini memiliki karakteristik unik di Jepang yang membuatnya berbeda dari kasus serupa di negara lain. Faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kekerasan domestik di Jepang. Norma-norma tradisional yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga sering kali mendorong individu untuk menutupi konflik domestik daripada mencari bantuan. Selain itu, stigma sosial terhadap gangguan mental dan kekerasan domestik membuat banyak individu enggan mengakses layanan kesehatan mental atau melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana *familicide* dapat berkembang tanpa hambatan, hingga mencapai tahap di mana intervensi tidak lagi memungkinkan.

Dalam analisis global, kebijakan pencegahan *familicide* yang efektif sering kali melibatkan pendekatan berbasis komunitas yang memadukan layanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan penegakan hukum. Namun, di Jepang, pendekatan ini masih kurang diterapkan secara sistematis. Dukungan komunitas, yang dulunya menjadi ciri khas masyarakat Jepang, kini melemah akibat modernisasi dan urbanisasi. Sementara itu, layanan kesehatan mental di Jepang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya tenaga profesional yang terlatih dan stigma terhadap pasien. Dalam hal penegakan hukum, meskipun Jepang memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah,

sistem peradilan pidana sering kali tidak cukup tanggap terhadap kasus kekerasan domestik yang dapat berujung pada *familicide*.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi fenomena *familicide* di masyarakat urban Jepang melalui analisis kritis terhadap kebijakan kriminal yang ada. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam kebijakan kriminal Jepang dan menawarkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat membantu mencegah terjadinya *familicide* di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan perspektif baru tentang bagaimana tekanan sosial dan ekonomi di lingkungan urban memengaruhi dinamika kekerasan dalam keluarga, serta bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang hukum dan kesehatan mental.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Familicide* di Masyarakat Urban Jepang**

Berdasarkan data resmi dari Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA), angka *familicide* relatif rendah dibandingkan dengan total kejahatan domestik lainnya, tetapi tetap menjadi perhatian serius karena dampaknya yang destruktif terhadap keluarga dan komunitas. Selama satu dekade terakhir, pola *familicide* di Jepang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus melibatkan pelaku yang memiliki hubungan langsung dengan korban, seperti pasangan, anak, atau orang tua (Linda C. Karlsson et al., 2018). Data menunjukkan bahwa pelaku biasanya adalah pria paruh baya hingga lanjut usia, dengan latar belakang tekanan finansial, konflik interpersonal, atau gangguan mental yang tidak

tertangani. Dalam beberapa kasus, motif pelaku dapat ditelusuri hingga ke tekanan sosial-ekonomi yang khas dalam masyarakat modern Jepang.

Analisis statistik selama lima hingga sepuluh tahun terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan terkait karakteristik *familicide* di Jepang. Sebagian besar kasus terjadi di wilayah urban, seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan tekanan hidup yang intens. Berdasarkan laporan tahunan kriminal dari NPA, hampir 70% kasus *familicide* melibatkan keluarga inti, dengan korban yang sering kali terdiri dari lebih dari satu individu. Misalnya, dalam kasus di mana kepala keluarga memutuskan untuk mengakhiri hidup seluruh anggota keluarga, motif utamanya sering kali terkait dengan kehancuran finansial atau rasa malu sosial yang tidak dapat diatasi. Tren ini menunjukkan bahwa *familicide* sering kali merupakan reaksi ekstrem terhadap akumulasi tekanan yang bersifat multidimensi, termasuk kegagalan ekonomi, konflik hubungan yang berkepanjangan, serta ketiadaan dukungan sosial.

Statistik juga menunjukkan bahwa kasus *familicide* di Jepang tidak hanya terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah tetapi juga pada kelompok dengan status ekonomi menengah. Pelaku dari kelompok ini biasanya merasa terjebak oleh ekspektasi sosial untuk mempertahankan citra stabilitas ekonomi dan harmoni keluarga. Dalam beberapa kasus, pelaku mengalami tekanan besar karena kehilangan pekerjaan, kebangkrutan bisnis, atau pengangguran berkepanjangan, yang kemudian menciptakan perasaan gagal memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam masyarakat Jepang, di mana norma budaya sangat menghargai kehormatan keluarga, kegagalan finansial sering kali dipandang sebagai aib besar yang sulit diterima, baik oleh pelaku maupun komunitas sekitar. Akibatnya, pelaku *familicide* merasa terpaksa mengambil langkah ekstrem untuk "melindungi" keluarga mereka dari rasa malu atau penderitaan yang lebih besar.

Secara demografis, pelaku *familicide* di Jepang lebih sering berasal dari kelompok usia paruh baya hingga lanjut usia (Takayuki Kageyama, 2012). Data dari NPA mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku berada di rentang usia 40 hingga 60 tahun, meskipun ada pula kasus yang melibatkan pelaku di atas usia 70 tahun. Di sisi lain, korban *familicide* sering kali adalah perempuan dan anak-anak, yang berada dalam posisi rentan secara emosional dan ekonomi terhadap pelaku. Dalam banyak kasus, korban perempuan adalah istri yang bergantung secara finansial pada suami, sementara anak-anak biasanya dianggap sebagai "bagian dari keluarga" yang harus dilindungi atau dibebaskan dari penderitaan menurut sudut pandang pelaku. Pola korban ini mencerminkan adanya

ketimpangan kekuasaan dalam struktur keluarga di Jepang, di mana kepala keluarga memegang otoritas yang besar, yang terkadang disalahgunakan dalam situasi krisis.

Analisis lebih lanjut terhadap statistik juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus *familicide* di Jepang disertai oleh tindakan bunuh diri pelaku, yang dikenal sebagai fenomena "murder-suicide" (Hava Dayan, 2018). Dalam kasus seperti ini, pelaku membunuh anggota keluarga mereka sebelum mengakhiri hidup mereka sendiri, yang sering kali dipandang sebagai tindakan terakhir untuk menghindari rasa malu atau konsekuensi hukum. Pola ini menunjukkan bahwa *familicide* tidak hanya sekadar tindakan kriminal, tetapi juga bentuk pelarian dari tekanan hidup yang dirasakan sebagai tak tertahankan. Dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, pelaku bahkan meninggalkan surat yang menjelaskan motif mereka, yang biasanya mencakup rasa putus asa, depresi, atau keinginan untuk menyelamatkan keluarga dari kesulitan yang lebih besar. Fenomena ini menyoroti perlunya intervensi sosial dan psikologis yang lebih efektif untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

Wilayah geografis juga memengaruhi distribusi kasus *familicide* di Jepang. Kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka memiliki jumlah kasus lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, meskipun tingkat kekerasan domestik di wilayah pedesaan juga cukup mengkhawatirkan. Di daerah urban, isolasi sosial sering kali menjadi faktor pemicu, karena individu yang menghadapi tekanan ekonomi atau emosional sering kali tidak memiliki jaringan dukungan yang memadai. Di sisi lain, di daerah pedesaan, norma-norma tradisional yang kuat sering kali mendorong individu untuk menyembunyikan konflik domestik, sehingga sulit bagi pihak luar untuk mendeteksi tanda-tanda peringatan sebelum terjadi tragedi. Perbedaan antara wilayah urban dan pedesaan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan untuk mencegah *familicide* harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang spesifik.

Jika ditinjau dari karakteristik pelaku, korban dan motif, pelaku *familicide* di Jepang umumnya adalah laki-laki paruh baya atau lanjut usia yang berperan sebagai kepala keluarga. Data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku berada dalam rentang usia 40 hingga 60 tahun, meskipun tidak jarang ditemukan pelaku yang berusia di atas 70 tahun. Pria yang menjadi pelaku *familicide* cenderung menghadapi tekanan luar biasa dari ekspektasi sosial untuk menjadi penyedia utama bagi keluarganya. Ketika mereka mengalami kegagalan dalam memenuhi peran tersebut, baik karena kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau pensiun, muncul perasaan tidak berharga yang berkembang menjadi krisis identitas. Dalam masyarakat Jepang, kepala keluarga sering kali dianggap sebagai simbol stabilitas dan

kehormatan keluarga, sehingga kegagalan untuk memenuhi peran ini dipersepsikan tidak hanya sebagai kegagalan pribadi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap reputasi keluarga (Kseniia S. Vorkina, 2023). Tekanan semacam ini dapat memicu tindakan ekstrem seperti *familicide*, yang sering kali disertai dengan bunuh diri sebagai cara "mengakhiri" penderitaan atau menjaga kehormatan keluarga dari aib sosial.

Korban *familicide* di Jepang biasanya terdiri dari anggota keluarga inti, seperti istri, anak-anak, dan orang tua pelaku (Fumiko Satoh & Motoki Osawa, 2016). Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kasus-kasus ini, dengan perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat secara ekonomi dan sosial di dalam rumah tangga. Istri sebagai korban dalam *familicide* umumnya bergantung secara finansial pada pelaku, yang memperbesar kerentanannya terhadap kekerasan. Anak-anak, di sisi lain, sering kali menjadi korban pasif dari tindakan *familicide*, karena mereka dianggap oleh pelaku sebagai bagian integral dari keluarga yang harus "diselamatkan" dari penderitaan atau aib. Dalam beberapa kasus, orang tua dari pelaku juga menjadi korban, terutama dalam situasi di mana pelaku merasa tertekan oleh beban merawat orang tua yang sudah lanjut usia atau sakit parah. Pola ini menunjukkan bahwa *familicide* di Jepang sering kali merupakan tindakan yang melibatkan anggota keluarga dengan hubungan emosional yang erat, tetapi juga dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pelaku.

Motif *familicide* di Jepang mencerminkan kompleksitas tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi oleh pelaku. Salah satu motif yang paling umum adalah tekanan ekonomi, terutama dalam masyarakat urban yang menuntut kestabilan finansial yang tinggi. Pelaku yang mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, atau gagal menjalankan bisnis sering kali merasa bahwa mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga memilih *familicide* sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Motif ini sering kali dikaitkan dengan rasa malu sosial yang mendalam, terutama dalam budaya Jepang yang sangat menghargai citra harmoni dan kesuksesan keluarga. Pelaku sering kali merasa bahwa kegagalan mereka akan berdampak buruk tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada anggota keluarga lain, sehingga mereka memilih untuk "mengakhiri" penderitaan tersebut dengan cara yang tragis.

Motif lainnya adalah konflik interpersonal yang berkepanjangan dalam keluarga. Konflik antara pasangan suami istri, perbedaan pandangan antara orang tua dan anak, atau ketegangan antara pelaku dengan anggota keluarga lain sering kali menjadi pemicu *familicide*. Dalam kasus-kasus ini, pelaku merasa bahwa hubungan dalam keluarga telah mencapai titik tidak dapat diperbaiki, sehingga tindakan *familicide* dianggap sebagai satu-

satunya solusi untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam beberapa kasus, motif ini juga berkaitan dengan gangguan mental yang tidak terdiagnosis, seperti depresi berat atau gangguan stres pascatrauma. Gangguan mental ini dapat memperburuk kemampuan pelaku untuk mengatasi konflik secara konstruktif, sehingga mereka lebih rentan mengambil tindakan ekstrem.

Selain tekanan ekonomi dan konflik interpersonal, motif *familicide* di Jepang juga sering kali berkaitan dengan beban perawatan keluarga yang sakit atau lanjut usia. Dalam masyarakat Jepang, di mana tradisi mengutamakan tanggung jawab keluarga masih kuat, tanggung jawab untuk merawat anggota keluarga yang sakit sering kali jatuh pada kepala keluarga. Namun, kurangnya dukungan dari pemerintah atau komunitas untuk menangani beban perawatan ini menciptakan tekanan yang luar biasa, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi atau emosional yang rapuh. Pelaku *familicide* yang menghadapi situasi semacam ini sering kali merasa terjebak dalam dilema moral antara tanggung jawab terhadap keluarga dan ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, yang akhirnya mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang tragis.

Motif *murder-suicide* juga menjadi ciri khas dari banyak kasus *familicide* di Jepang. Dalam kasus seperti ini, pelaku tidak hanya membunuh anggota keluarganya tetapi juga mengakhiri hidup mereka sendiri dengan tujuan untuk "menghindarkan" keluarga dari penderitaan lebih lanjut. Fenomena ini mencerminkan dinamika psikologis yang rumit, di mana pelaku melihat *familicide* sebagai tindakan altruistik, meskipun konsekuensinya tragis. Murder-suicide sering kali terjadi dalam situasi di mana pelaku merasa bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar lain untuk mengatasi tekanan atau konflik yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan meninggalkan pesan tertulis yang menjelaskan alasan mereka, yang biasanya mencakup rasa putus asa, rasa bersalah, atau keinginan untuk melindungi keluarga dari apa yang mereka anggap sebagai ancaman eksternal.

Berbicara mengenai pengaruh kehidupan urban, kehidupan urban di Jepang telah membawa perubahan besar dalam dinamika sosial dan ekonomi, termasuk dalam hubungan keluarga. Urbanisasi, yang ditandai oleh perpindahan besar-besaran penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama, telah menciptakan lingkungan yang penuh tekanan, kompetisi, dan isolasi sosial. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi stabilitas keluarga dan meningkatkan potensi konflik domestik. Dalam masyarakat urban, keluarga sering kali terputus dari jaringan dukungan tradisional, seperti kerabat atau komunitas lokal, yang sebelumnya berperan

penting dalam mediasi konflik dan memberikan dukungan emosional maupun material. Ketika konflik keluarga muncul di lingkungan urban yang terisolasi, tidak ada mekanisme alami untuk meredam ketegangan atau menyediakan solusi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *familicide*.

Lingkungan urban di Jepang juga menciptakan kondisi yang sangat kompetitif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan anak (Satoshi Akutsu et al., 2022). Individu yang tinggal di kota besar sering menghadapi tekanan yang intens untuk memenuhi tuntutan hidup yang tinggi, termasuk biaya perumahan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Kepala keluarga, yang secara budaya diharapkan menjadi penyedia utama, sering kali merasa tertekan oleh beban finansial yang terus meningkat. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi ini menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga, terutama ketika pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau ketika salah satu anggota keluarga kehilangan pekerjaan. Kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi seperti Tokyo telah menjadi simbol dari perjuangan ekonomi ini, di mana banyak keluarga harus berjuang keras untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Ketika tekanan tersebut tidak tertangani, konflik domestik dapat meningkat menjadi kekerasan, yang dalam kasus ekstrem dapat berujung pada tragedi seperti *familicide*.

Selain tekanan ekonomi, urbanisasi juga menciptakan pola kerja yang cenderung mengalienasi individu dari keluarganya. Budaya kerja di Jepang, yang dikenal dengan istilah *karoshi* atau kematian akibat kerja berlebihan, menuntut jam kerja yang panjang dan komitmen yang intens dari para pekerja (Shubham Gupta, 2023). Kondisi ini membuat banyak kepala keluarga, khususnya pria, menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja, sehingga waktu yang tersedia untuk berinteraksi dengan keluarga menjadi sangat terbatas. Kurangnya waktu berkualitas antara anggota keluarga sering kali memperburuk hubungan interpersonal dan menciptakan jarak emosional. Dalam banyak kasus, alienasi emosional ini menjadi akar dari konflik yang tidak terselesaikan, yang kemudian dapat meningkat menjadi kekerasan. Kehidupan urban juga sering kali memisahkan pasangan atau anggota keluarga secara fisik karena alasan pekerjaan, yang lebih lanjut memperlemah ikatan emosional di dalam rumah tangga.

Isolasi sosial di kota-kota besar merupakan faktor lain yang memperburuk dinamika kekerasan dalam keluarga. Meskipun kota-kota besar di Jepang dihuni oleh jutaan orang, banyak penduduknya yang hidup dalam isolasi sosial karena kurangnya interaksi dengan tetangga atau komunitas sekitar. Urbanisasi telah menggantikan pola kehidupan tradisional berbasis komunitas dengan gaya hidup individualistik, di mana

hubungan sosial di luar keluarga menjadi semakin langka. Isolasi ini membuat keluarga yang mengalami konflik atau kekerasan domestik tidak memiliki akses ke dukungan sosial atau mediasi yang efektif. Dalam masyarakat pedesaan, konflik keluarga cenderung lebih mudah dideteksi oleh komunitas, yang kemudian dapat berperan dalam menengahi atau memberikan dukungan kepada keluarga tersebut. Namun, di kota-kota besar, banyak kasus kekerasan domestik yang tidak terungkap karena korban merasa malu untuk melaporkan, atau karena lingkungan sekitar tidak cukup peduli untuk memperhatikan tanda-tanda kekerasan.

Urbanisasi juga membawa dampak psikologis yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam hal stres dan gangguan mental. Kehidupan kota yang serba cepat, ditambah dengan tekanan ekonomi dan sosial, menciptakan kondisi yang ideal untuk munculnya gangguan seperti depresi, kecemasan, dan stres kronis (Jair de Jesus Mari, 2020). Dalam banyak kasus *familicide* di Jepang, pelaku menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang tidak terdiagnosis, yang diperburuk oleh isolasi sosial dan kurangnya dukungan psikologis. Sistem kesehatan mental di Jepang masih menghadapi tantangan besar, termasuk stigma terhadap individu yang mencari bantuan, kurangnya akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau, dan kekurangan tenaga profesional yang terlatih. Akibatnya, banyak individu yang menghadapi tekanan mental tidak mendapatkan intervensi yang memadai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko tindakan ekstrem seperti kekerasan dalam keluarga.

Tekanan untuk menjaga citra keluarga harmonis juga menjadi faktor unik yang memengaruhi dinamika kekerasan dalam keluarga di masyarakat urban Jepang. Budaya Jepang sangat menghargai keharmonisan dan stabilitas keluarga, yang sering kali membuat individu enggan untuk mengungkapkan konflik domestik kepada pihak luar (Takashi Saito & Kenichi Ohbuchi, 2014). Banyak korban kekerasan domestik, khususnya perempuan, merasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan karena khawatir mencemarkan nama baik keluarga. Dalam beberapa kasus, korban bahkan memilih untuk tetap diam karena tidak ingin memperburuk situasi, meskipun mereka berada dalam bahaya. Norma budaya ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan dalam rumah tangga berkembang tanpa deteksi atau intervensi dari pihak luar, hingga akhirnya mencapai tingkat yang fatal seperti *familicide*.

Kehidupan urban juga memperburuk masalah ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Meskipun Jepang telah mengalami modernisasi yang pesat, norma-norma patriarki masih kuat dalam budaya keluarga. Perempuan sering kali menghadapi tekanan

untuk menjadi pengasuh utama bagi anak-anak dan orang tua lanjut usia, sementara juga memenuhi tuntutan sosial sebagai istri yang "ideal." Dalam situasi di mana konflik domestik muncul, perempuan sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari situasi tersebut, baik karena ketergantungan ekonomi terhadap pasangan atau karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Ketimpangan gender ini tidak hanya membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan, tetapi juga memperlemah kemampuan keluarga untuk mengatasi konflik secara konstruktif.

### **Analisis terhadap Kebijakan Kriminal Jepang**

Kebijakan penegakan hukum di Jepang dalam menangani kasus kekerasan domestik, termasuk *familicide*, memiliki kerangka hukum yang terstruktur, tetapi sering kali menunjukkan kelemahan dalam implementasi dan pencegahan dini. Sistem hukum Jepang secara garis besar diatur melalui Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence Prevention Act*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski kedua kerangka hukum tersebut berfungsi untuk menangani kekerasan domestik dan tindak pidana berat seperti pembunuhan, kebijakan yang ada cenderung bersifat reaktif dan kurang memberikan penekanan pada intervensi preventif. Dalam kasus *familicide*, peraturan hukum yang berlaku sering kali baru diterapkan setelah tragedi terjadi, tanpa ada mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi risiko atau mencegah eskalasi konflik dalam rumah tangga.

Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jepang merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan domestik. Undang-undang ini mencakup langkah-langkah seperti penerbitan perintah perlindungan terhadap korban, yang melarang pelaku untuk mendekati korban dalam jangka waktu tertentu. Meskipun langkah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan langsung kepada korban, implementasinya menghadapi sejumlah kendala. Perintah perlindungan hanya dapat diterbitkan jika korban secara aktif melaporkan kekerasan yang mereka alami, suatu proses yang sering terhambat oleh stigma sosial dan tekanan budaya yang kuat untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, banyak korban yang enggan mencari bantuan karena takut akan pembalasan dari pelaku atau tidak percaya pada kemampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif.

Sistem hukum pidana Jepang juga memiliki kerangka kerja untuk menangani kasus-kasus *familicide* melalui penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, pelaku dapat dihukum penjara seumur hidup atau bahkan dijatuhi hukuman mati, tergantung pada beratnya kejahatan (Zul Khaidir Kadir, 2024). Namun, pendekatan yang menitikberatkan pada hukuman setelah kejahatan terjadi menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem hukum yang tidak mampu mencegah terjadinya kekerasan domestik sebelum mencapai tahap fatal. Dalam banyak kasus *familicide* yang mencuat, tanda-tanda peringatan seperti konflik rumah tangga yang berulang, perilaku kekerasan, atau gangguan mental pada pelaku sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik oleh otoritas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Jepang masih bersifat fragmentaris, dengan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas isu kekerasan domestik.

Salah satu aspek yang paling mencolok dalam kebijakan penegakan hukum Jepang adalah peran polisi dalam menangani kasus kekerasan domestik. Polisi memiliki kewenangan untuk merespons laporan kekerasan domestik, tetapi kerap kali ragu untuk campur tangan dalam konflik rumah tangga karena anggapan bahwa masalah tersebut adalah urusan pribadi keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada budaya Jepang yang menghargai privasi keluarga dan cenderung menghindari campur tangan pihak luar. Akibatnya, banyak laporan kekerasan domestik yang tidak ditindaklanjuti dengan serius, terutama jika tidak ada bukti fisik yang jelas atau jika korban enggan memberikan pernyataan resmi. Dalam kasus *familicide*, pendekatan ini dapat berakibat fatal, karena tanda-tanda peringatan yang seharusnya dapat diidentifikasi sebelumnya justru diabaikan.

Kelemahan lain dalam kebijakan penegakan hukum Jepang adalah kurangnya integrasi antara sistem peradilan pidana dan layanan sosial. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan domestik yang memiliki gangguan mental atau tekanan psikologis tidak dirujuk ke layanan kesehatan mental yang tepat. Sebaliknya, sistem hukum lebih sering berfokus pada penjatuhan hukuman pidana tanpa memperhatikan kebutuhan rehabilitasi atau intervensi psikologis. Pendekatan yang terfragmentasi ini tidak hanya mengabaikan akar masalah yang mendorong pelaku melakukan kekerasan, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan berulang di masa depan. Dalam konteks *familicide*, kegagalan untuk menyediakan intervensi yang komprehensif dapat memperparah situasi, terutama jika pelaku merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka mengelola tekanan emosional atau ekonomi.

Meskipun terdapat kekurangan dalam sistem hukum yang ada, beberapa langkah reformasi telah diambil untuk meningkatkan penanganan kekerasan domestik di Jepang. Salah satu inisiatif penting adalah peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan meresponsnya dengan lebih efektif. Selain itu, beberapa lembaga telah mulai mengadopsi pendekatan berbasis risiko, di mana polisi dan pekerja sosial bekerja sama untuk mengidentifikasi keluarga yang rentan terhadap kekerasan dan menyediakan intervensi awal. Namun, upaya ini masih berada pada tahap awal dan menghadapi tantangan dalam hal sumber daya serta dukungan politik yang konsisten.

Peran pengadilan dalam menangani kasus *familicide* juga menunjukkan dinamika yang kompleks. Dalam banyak kasus, hakim cenderung mempertimbangkan faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, gangguan mental, atau konflik interpersonal sebagai alasan yang meringankan bagi pelaku. Pendekatan ini dapat menciptakan kesan bahwa sistem peradilan pidana lebih berpihak pada pelaku daripada memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, pendekatan yang terlalu fokus pada hukuman setelah kejadian sering kali tidak disertai dengan langkah-langkah rehabilitasi yang memadai, baik bagi pelaku maupun bagi keluarga yang selamat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Jepang perlu lebih menekankan pada pencegahan dan pemulihan, bukan hanya pada penjatuhan hukuman.

Evaluasi terhadap peran polisi, pengadilan, dan sistem peradilan pidana di Jepang dalam menangani kasus *familicide* dan kekerasan domestik menunjukkan adanya celah yang signifikan antara kebijakan yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Polisi, sebagai garda terdepan dalam sistem penegakan hukum, memainkan peran yang krusial dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons kekerasan domestik. Namun, respons mereka sering kali terbatas oleh pandangan budaya dan kebijakan internal yang mengutamakan mediasi daripada intervensi langsung. Dalam banyak kasus, polisi lebih cenderung menganggap konflik rumah tangga sebagai masalah privat yang seharusnya diselesaikan secara internal oleh keluarga, alih-alih sebagai masalah hukum yang memerlukan intervensi tegas (Claire Houston, 2014). Pendekatan ini sering kali mengakibatkan tanda-tanda peringatan kekerasan domestik yang berpotensi berujung pada *familicide* diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara memadai.

Tingkat pelaporan yang rendah terkait kekerasan domestik juga menjadi tantangan besar bagi polisi dalam menjalankan peran mereka. Banyak korban, terutama perempuan, merasa enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena stigma sosial yang melekat kuat di masyarakat Jepang. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada pelaku dan

ketakutan akan pembalasan lebih lanjut sering kali mencegah korban untuk mencari perlindungan atau melibatkan pihak berwenang. Ketika laporan kekerasan domestik benar-benar diajukan, respons polisi sering kali bersifat minimalis. Dalam banyak kasus, polisi hanya memberikan peringatan verbal kepada pelaku tanpa mengambil langkah-langkah proaktif seperti merujuk korban ke layanan perlindungan atau memastikan keberlanjutan perlindungan bagi korban. Pola ini menunjukkan bahwa, meskipun polisi memiliki wewenang untuk melindungi korban melalui penerapan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, peran pengadilan dalam menangani kasus kekerasan domestik dan *familicide* juga menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam banyak kasus kekerasan domestik yang diajukan ke pengadilan, hakim sering kali memberikan penekanan pada mediasi sebagai metode utama penyelesaian konflik (M. Chalid & Idul Adnan, 2024), terutama jika tidak ada bukti fisik yang kuat atau jika pelaku bersikap kooperatif selama proses hukum. Pendekatan ini, meskipun bertujuan untuk menjaga harmoni keluarga, sering kali mengabaikan risiko eskalasi kekerasan dan gagal memberikan keadilan bagi korban. Dalam kasus *familicide* yang telah terjadi, pengadilan menghadapi dilema dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku. Banyak hakim mempertimbangkan tekanan ekonomi, gangguan mental, atau rasa putus asa sebagai faktor yang meringankan hukuman, yang dalam beberapa kasus dapat menciptakan persepsi bahwa sistem peradilan lebih berpihak pada pelaku daripada memberikan keadilan bagi korban.

Selain itu, pengadilan Jepang sering kali tidak dilengkapi dengan mekanisme pendukung yang memadai untuk menangani aspek psikologis dan sosial dari kekerasan domestik. Tidak adanya layanan rehabilitasi yang terintegrasi untuk pelaku kekerasan dan kurangnya akses korban ke pendampingan hukum atau psikologis menunjukkan bahwa sistem pengadilan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan unik dalam kasus-kasus kekerasan domestik. Dalam kasus *familicide*, pengadilan cenderung berfokus pada elemen pidana dari tindakan tersebut, seperti pembuktian niat pelaku dan tingkat kesadaran mereka saat melakukan kejahatan, tanpa secara substansial mengeksplorasi faktor-faktor sistemik yang mungkin telah memicu tragedi tersebut. Pendekatan ini menunjukkan perlunya reformasi untuk memperluas perspektif pengadilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan domestik, agar tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan.

Sistem peradilan pidana secara keseluruhan juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kekerasan domestik. Ketiadaan koordinasi yang kuat antara polisi, pengadilan, dan layanan sosial menciptakan celah dalam penanganan kasus kekerasan domestik, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku. Misalnya, ketika korban mengajukan laporan kekerasan, jarang ada tindak lanjut yang melibatkan lembaga lain seperti pekerja sosial atau layanan kesehatan mental. Kurangnya integrasi ini menghambat upaya untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban dan mencegah kekerasan berulang. Dalam banyak kasus *familicide*, pelaku diketahui memiliki riwayat konflik rumah tangga yang telah dilaporkan sebelumnya, tetapi tidak ada intervensi yang cukup untuk mencegah eskalasi kekerasan.

Lebih jauh lagi, pendekatan sistem peradilan pidana di Jepang terhadap *familicide* sering kali bersifat retrospektif, dengan fokus pada investigasi dan penuntutan setelah tragedi terjadi (Dimitri Venoverbeke, 2022). Sementara itu, upaya pencegahan seperti identifikasi risiko dan intervensi awal masih kurang mendapat perhatian. Padahal secara kriminologis, kejahatan seharusnya bisa diminimalisir dengan mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2017). Meskipun Jepang memiliki tingkat kejahatan yang rendah secara keseluruhan, kasus *familicide* menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak cukup tanggap terhadap jenis kekerasan yang bersifat privat tetapi berisiko tinggi ini. Program pelatihan untuk aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, belum sepenuhnya mencakup penanganan kasus kekerasan domestik yang melibatkan dinamika kompleks seperti gangguan mental atau tekanan ekonomi. Akibatnya, banyak pelaku yang berpotensi melakukan kekerasan tidak terdeteksi oleh sistem, hingga akhirnya mereka melakukan tindakan fatal seperti *familicide*.

Salah satu kritik utama terhadap kebijakan kriminal Jepang adalah pendekatannya yang terlalu reaktif, dengan fokus yang lebih besar pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi daripada pada pencegahan dini. Dalam banyak kasus *familicide*, tanda-tanda peringatan telah terlihat jauh sebelum tragedi terjadi, tetapi sistem hukum tidak memiliki mekanisme untuk merespons tanpa adanya laporan resmi. Misalnya, perilaku kekerasan yang terus berulang, konflik yang tidak terselesaikan, atau tekanan emosional yang dihadapi oleh pelaku sering kali diabaikan oleh otoritas, karena tidak ada kebijakan yang mengharuskan intervensi proaktif. Hal ini berbeda dengan pendekatan di negara-negara seperti Inggris atau Australia, di mana kebijakan berbasis risiko diterapkan untuk

mengidentifikasi keluarga yang rentan melalui pemantauan oleh polisi, pekerja sosial, dan layanan kesehatan. Sistem berbasis risiko semacam ini memungkinkan deteksi dini dan penyediaan intervensi yang dirancang untuk mencegah eskalasi kekerasan. Jepang dapat mengambil pelajaran dari model-model ini dengan menciptakan sistem yang memungkinkan lembaga-lembaga terkait untuk berbagi data dan bekerja sama dalam menangani risiko kekerasan domestik.

Kurangnya integrasi antara lembaga penegak hukum, layanan sosial, dan sistem kesehatan mental di Jepang juga menjadi penghalang utama dalam mencegah *familicide*. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh birokrasi yang kaku dan kurangnya sumber daya. Dalam sistem yang ada, polisi sering kali hanya menangani aspek penegakan hukum tanpa melibatkan pekerja sosial atau profesional kesehatan mental dalam menyelesaikan konflik domestik. Sebaliknya, layanan sosial jarang memiliki akses ke informasi yang relevan tentang keluarga yang berisiko, karena data yang dimiliki oleh polisi atau sistem peradilan tidak dapat dibagikan secara bebas. Hal ini menciptakan celah besar dalam penanganan kekerasan domestik, di mana keluarga yang membutuhkan bantuan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Sebagai perbandingan, negara-negara Skandinavia telah berhasil mengintegrasikan layanan kesehatan, sosial, dan penegakan hukum dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi, memungkinkan mereka untuk memberikan respons yang lebih efektif terhadap kasus kekerasan domestik. Jepang dapat mengambil inspirasi dari model ini untuk mengurangi fragmentasi dalam sistemnya.

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam memengaruhi respons terhadap *familicide* di Jepang (Roxanne L. Russell et al., 2017). Budaya Jepang yang sangat menghargai harmoni keluarga dan privasi rumah tangga sering kali menciptakan hambatan bagi korban kekerasan untuk melapor atau mencari bantuan. Banyak korban merasa bahwa melibatkan pihak luar dalam konflik domestik akan mencemarkan nama baik keluarga, sehingga mereka memilih untuk tetap diam meskipun berada dalam bahaya. Selain itu, norma-norma gender tradisional yang masih kuat di Jepang juga memperburuk situasi ini, dengan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Dalam konteks *familicide*, norma-norma ini dapat memperkuat kontrol pelaku terhadap keluarga dan memperlemah kemampuan korban untuk melarikan diri dari situasi berbahaya. Negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru telah berhasil mengatasi hambatan budaya semacam ini dengan meluncurkan kampanye kesadaran publik yang dirancang untuk mengubah persepsi masyarakat tentang

kekerasan domestik dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi korban. Jepang perlu mempertimbangkan pendekatan serupa untuk mengatasi stigma sosial yang masih melekat pada isu ini.

Sistem kesehatan mental di Jepang juga menghadapi tantangan besar dalam menangani risiko kekerasan domestik yang dapat berujung pada *familicide*. Gangguan mental sering kali menjadi salah satu faktor pemicu dalam banyak kasus *familicide*, tetapi stigma terhadap masalah kesehatan mental membuat banyak individu enggan mencari bantuan. Bahkan ketika individu yang berisiko mencari perawatan, sistem kesehatan mental di Jepang sering kali kekurangan sumber daya dan tenaga profesional untuk memberikan intervensi yang memadai. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, program-program intervensi berbasis kesehatan mental telah menjadi bagian integral dari upaya pencegahan kekerasan domestik. Program-program ini melibatkan evaluasi risiko oleh psikolog klinis dan penyediaan layanan konseling bagi keluarga yang berada dalam tekanan emosional. Mengadopsi pendekatan serupa dapat membantu Jepang untuk mengidentifikasi dan menangani risiko *familicide* secara lebih efektif.

Selain itu, kebijakan penegakan hukum di Jepang juga perlu mengatasi keterbatasannya dalam menangani kekerasan domestik yang tidak dilaporkan. Banyak korban, terutama perempuan, enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut akan pembalasan atau karena tidak percaya bahwa sistem hukum akan memberikan perlindungan yang memadai. Dalam banyak kasus, polisi di Jepang hanya memberikan peringatan verbal kepada pelaku tanpa mengambil tindakan lebih lanjut, bahkan ketika ada bukti kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya melemahkan perlindungan bagi korban tetapi juga gagal mencegah pelaku dari mengulangi tindakannya. Negara-negara seperti Australia telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan polisi untuk menyelidiki semua laporan kekerasan domestik secara mendalam, terlepas dari keinginan korban untuk melanjutkan kasus. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat pelaporan dan mengurangi insiden kekerasan domestik. Jepang perlu mempertimbangkan kebijakan serupa untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukumnya.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan sistem deteksi dini yang efektif untuk mengidentifikasi keluarga yang berada dalam risiko kekerasan domestik atau *familicide*. Sistem ini dapat berbasis pada pendekatan berbasis risiko, yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti laporan kekerasan domestik, evaluasi kesehatan mental, dan konflik yang terdeteksi oleh pekerja sosial. Pemerintah perlu membangun database nasional yang memungkinkan lembaga penegak hukum, pekerja

sosial, dan layanan kesehatan mental untuk berbagi informasi secara real-time. Dengan sistem ini, keluarga yang menunjukkan tanda-tanda risiko tinggi dapat segera mendapatkan perhatian dan intervensi yang diperlukan. Misalnya, ketika ada laporan kekerasan domestik yang berulang, polisi dapat bekerja sama dengan pekerja sosial untuk memantau situasi dan menyediakan dukungan bagi korban, sementara pelaku dirujuk ke program rehabilitasi atau konseling.

Kebijakan juga harus mendorong reformasi sistem penegakan hukum untuk memastikan bahwa polisi dan aparat peradilan lebih responsif terhadap kekerasan domestik. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah menyediakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda risiko kekerasan, termasuk kekerasan psikologis atau emosional yang sering kali menjadi awal dari kekerasan fisik. Polisi perlu didorong untuk mengambil tindakan tegas, seperti mengeluarkan perintah perlindungan segera, bahkan ketika korban tidak secara eksplisit meminta bantuan. Selain itu, kebijakan harus memastikan bahwa semua laporan kekerasan domestik diselidiki secara menyeluruh, dan tidak hanya ditangani sebagai masalah domestik yang dianggap tidak membutuhkan campur tangan hukum. Penekanan harus diberikan pada pencegahan kekerasan yang lebih serius melalui tindakan awal yang proaktif.

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental juga merupakan langkah penting dalam upaya mencegah *familicide*. Gangguan mental sering kali menjadi salah satu faktor pemicu dalam kasus-kasus *familicide*, tetapi stigma yang kuat terhadap masalah kesehatan mental di Jepang membuat banyak individu enggan mencari bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma yang terkait dengannya. Selain itu, layanan kesehatan mental harus dibuat lebih mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui subsidi pemerintah untuk layanan konseling dan terapi. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem hukum, sehingga pelaku yang menunjukkan tanda-tanda gangguan mental dapat dirujuk ke program rehabilitasi yang sesuai sebagai bagian dari proses hukum.

Reformasi sistem peradilan pidana juga harus mencakup pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman (Abdul Halim & Sri Ismoyo, 2023). Program-program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan domestik perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara luas, dengan tujuan untuk mengatasi akar penyebab perilaku kekerasan mereka. Misalnya, pelaku yang menghadapi tekanan

ekonomi atau emosional dapat diberikan pelatihan keterampilan kerja atau konseling untuk membantu mereka mengelola stres dan emosi mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Program semacam ini harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, dengan pelaku diwajibkan untuk mengikutinya sebagai bagian dari hukuman atau mediasi mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu mencegah kekerasan berulang tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk mereformasi perilaku mereka.

Kebijakan berbasis komunitas juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah *familicide*. Urbanisasi telah menghilangkan banyak jaringan dukungan tradisional yang dulunya membantu keluarga mengatasi konflik dan tekanan hidup (Andie Bandile, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan program berbasis komunitas yang dirancang untuk membangun kembali hubungan sosial dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi tekanan. Program ini dapat mencakup pembentukan kelompok pendukung bagi korban kekerasan domestik, pelatihan mediasi konflik untuk anggota komunitas, dan penyediaan pusat-pusat layanan keluarga di lingkungan urban. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pencegahan kekerasan domestik, program ini tidak hanya membantu mendeteksi kasus-kasus berisiko tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi keluarga.

Selain itu, pemerintah perlu meluncurkan kampanye kesadaran publik yang dirancang untuk mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan domestik dan *familicide*. Kampanye ini harus menekankan bahwa kekerasan domestik adalah pelanggaran hukum yang serius dan bukan masalah privat yang seharusnya disembunyikan. Pesan-pesan ini dapat disampaikan melalui media massa, sekolah, dan tempat kerja untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kampanye juga harus memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia bagi korban, seperti hotline kekerasan domestik, tempat penampungan, dan layanan konseling. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kampanye semacam ini dapat membantu mengurangi stigma yang mencegah korban melaporkan kekerasan dan mendorong individu untuk mencari bantuan lebih awal.

Rekomendasi lain yang perlu dipertimbangkan adalah menciptakan mekanisme pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan benar-benar efektif dalam mencegah *familicide*. Pemerintah harus membentuk badan independen yang bertugas untuk mengaudit implementasi kebijakan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Badan ini juga dapat bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tentang kekerasan domestik dan *familicide*, yang akan menjadi dasar bagi pembuat

kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan mereka secara fleksibel untuk mengatasi tantangan baru yang muncul.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

*Familicide* di Jepang adalah bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari kompleksitas interaksi antara tekanan sosial, budaya, ekonomi, dan kelemahan struktural dalam sistem hukum dan layanan sosial. *Familicide* tidak semata-mata dapat dipahami sebagai tindakan kriminal individu, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial yang gagal mendeteksi dan menangani konflik domestik secara efektif. Kelemahan dalam mendeteksi tanda-tanda awal kekerasan domestik, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan pendekatan budaya yang cenderung menutupi konflik rumah tangga telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan domestik bereskalasi hingga mencapai tingkat yang fatal. Meskipun Jepang memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah, *familicide* tetap menjadi tantangan yang mengungkap celah besar dalam kebijakan kriminal negara tersebut. Respons hukum yang bersifat reaktif dan kurangnya mekanisme pencegahan dini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga pada pencegahan melalui deteksi risiko dan intervensi yang terkoordinasi.

Pencegahan *familicide* di Jepang memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup reformasi sistem penegakan hukum, penguatan layanan kesehatan mental, dan pengembangan program berbasis komunitas. Sistem hukum yang ada saat ini harus dirancang ulang untuk lebih proaktif dalam menangani kekerasan domestik, dengan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan integrasi layanan sosial ke dalam proses hukum. Selain itu, layanan kesehatan mental harus ditingkatkan untuk mengatasi akar penyebab psikologis yang sering kali menjadi pemicu *familicide*. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan melalui kampanye kesadaran publik dan program dukungan komunitas yang dapat membantu keluarga yang menghadapi tekanan. Reformasi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan sistem yang responsif dan efektif dalam melindungi keluarga dari tragedi *familicide*. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Jepang dapat mengurangi risiko *familicide* secara signifikan dan memberikan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi keluarga.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim, & Sri Ismoyo. (2023). Analysis of restorative justice in the criminal justice system. *Enigma in Law*, 1(1), 12–16.
- Akutsu, S., Katsumura, F., & Yamamoto, S. (2022). The antecedents and consequences of workholism: Findings from the modern Japanese labor market. *Frontiers in Psychology*, 13(1), 812–821. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.740494>
- Andreas, & Ilic, A. (2020). Is familicide a distinct subtype of mass murder? Evidence from a Swiss national cohort. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 30(1), 28–37. <https://doi.org/10.1002/cbm.2179>
- Bandile, A. (2024). The effect of urbanization on community social networks and support systems. *International Journal of Humanity and Social Sciences*, 3(3), 46–59.
- Chalid, M., & Adnan, I. (2024). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(2), 1–15.
- Dayan, H. (2018). Sociocultural aspects of femicide-suicide: The case of Israel. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(9), 5148–5166. <https://doi.org/10.1177/0886260518779330>
- Gupta, S. (2023). Unmasking Japan's work culture. *International Journal of Advanced Research*, 11(1), 342–343.
- Houston, C. (2014). How feminist theory became (criminal) law: Tracing the path to mandatory criminal intervention in domestic violence cases. *Michigan Journal of Gender & Law*, 21(2), 271–272.
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme kultural: Eksplorasi fenomena pembunuhan demi kehormatan (honor killing) dalam lensa teori kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kageyama, T. (2012). Views on suicide among middle-aged and elderly populations in Japan: Their association with demographic variables and feeling shame in seeking help. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 66(2), 105–112. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2012.02374.x>
- Karlsson, L. C., Antfolk, J., Putkonen, H., Amon, S., Guerreiro, J. da S., de Vogel, V., Flynn, S., & Weizmann-Henelius, G. (2018). Familicide: A systematic literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(1), 83–98. <https://doi.org/10.1177/1524838017700235>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2017). *Kriminologi: Esensi dan perspektif arus utama*. Trussmedia Grafika.
- Mari, J. de J. (2020). Mental health in big cities. *Current Opinion in Psychiatry*, 33(3), 231–232. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000622>
- Russell, R. L., Metraux, D. A., & Tohen, M. (2017). Cultural influence on suicide in Japan. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 71(1), 2–5. <https://doi.org/10.1111/pcn.12501>

- Ruszel, J. B. (2019). The fall of the family-state and rise of the enterprise society: Family as ideology and site of conservative power in modern Japan. *The Arbutus Review*, 10(1), 21–35.
- Saito, T., & Ohbuchi, K. (2014). Who suffers pluralistic ignorance of conflict avoidance among Japanese? Individual difference in the value of social harmony. *International Journal of Conflict Management*, 25(3), 261–275. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-11-2012-0074>
- Satoh, F., & Osawa, M. (2016). Trend of homicide-suicide in Kanagawa Prefecture (Japan): Comparison with Western countries. *Medicine, Science and the Law*, 56(4), 258–263. <https://doi.org/10.1177/0025802416629227>
- Selin, H. (2021). *Aging across cultures: Growing old in the non-Western world*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-52317-4>
- Venoverbeke, D. (2022). Protecting the script of the Japanese criminal justice system. *Law & Social Inquiry*, 47(2), 734–740. <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.27>
- Vorkina, K. S. (2023). Changing the image of woman and the family model: Rethinking the traditional way of life in the current realities of Japanese society. *Vestnik of Saint Petersburg University, Asian and African Studies*, 15(2), 385–397. <https://doi.org/10.21638/spbu.21.2023.205>